

Tanggapan BP atas Laporan TIAP tertanggal 25 Februari 2005

Tinjauan Ulang

BP berterimakasih kepada Panel Penasihat Tangguh atas laporan tahunan mereka, yang disusun berdasarkan atas kunjungan mereka ke Indonesia, pada Desember 2004. TIAP memberikan konsultasi independen kepada BP, mengenai dampak terhadap aspek sosio-ekonomi dan lingkungan dari Proyek Tangguh, yang terletak di Teluk Bintuni, Papua, Indonesia.

BP senang, bahwa Panel mengakui dampak positif proyek, terhadap daerah tersebut, telah terjadi. Kami menyambut baik pengakuan Panel ini, bahwa usaha patungan¹ ini, dapat mengupayakan, dan sejauh ini berhasil dalam memenuhi standar tertinggi global untuk proyek-proyek yang dibangun di Negara-negara berkembang:

"BP mempunyai komitmen untuk memenuhi standar ini dan Panel menyimpulkan, bahwa, sejauh ini BP telah berhasil memenuhi komitmennya: ²

Tangguh merupakan proyek yang penuh tantangan dalam rona awal lingkungan sosial. Aspirasi BP yang tetap ada untuk mengembangkan proyek kelas dunia, yang memberikan sumbangsih pada pembangunan berkelanjutan di Teluk Bintuni. Proyek Tangguh akan merupakan suatu pelaku ekonomi di teluk untuk

1 BP Berau Limited bertindak sebagai Operator atas nama dirinya dan mitra Proyek Tangguh-nya adalah kontraktor Pemerintah Indonesia sesuai dengan tiga Kontrak Produksi Bagi Hasil (PSC).

2 "Laporan ketiga mengenai Proyek LNG Tangguh" Panel Penasihat Tangguh Independen Februari, 2005, halaman 3.

berpuluh tahun mendatang, dan berada pada tahap awal dari suatu perjalanan panjang, bersama-sama dengan penduduk setempat. Kami mengakui bahwa banyak kapasitas diperlukan dan akan mengambil waktu banyak untuk membangun dan kami yakin, bahwa proyek Tangguh dapat memainkan peran fasilitatif dalam hal ini.

Tantangan proyek kunci adalah meliputi keamanan, persepsi ketidakadilan di antara para stakeholder, migrasi, transisi sosial, pengelolaan pendapatan dan dampak lingkungan dari adanya peningkatan kegiatan di Teluk. BP, telah menempatkan ISP (Program Sosial Terpadu) bagi proyek tersebut sebagai sarana memitigasi risiko ini.

ISP berisi suatu Bab yang membahas tantangan-tantangan ini, masing-masing (untuk informasi lebih lanjut lihat www.bp.com):

- Keamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS)
- Strategi Keragaman Pertumbuhan (DGS)
- Pengelolaan Pelatihan dan Angkatan
- Pengembangan Masyarakat
- Usaha-usaha-mikro
- Dampak Fiskal
- Pemukiman kembali
- Forum dan Yayasan

BP telah mulai melaksanakan ISP tersebut; dengan kegiatan yang berkisar dari pembangunan masyarakat di desa-desa yang terkena dampak (DAV), sampai ke pembangunan kapasitas di seluruh wilayah teluk. Hasilnya telah dapat dilihat di seluruh desa-desa, telah diakui dalam laporan TIAP:

*“Beberapa manfaat dari program BP telah menjadi bukti pada setiap DAV dan di Babo. Proyek-proyek DAV termasuk Klinik Kesehatan, fasilitas air bersih dan filtrasi, perbaikan gereja dan mesjid, dan dermaga yang baru; di Babo, airstrip dan dermaga yang baru telah menghidupkan kegiatan komersial di Tanah Merah maupun Onar dan di Saengga, terdapat pembangunan perumahan dan fasilitas baru.”*³

Pada tahun 2004, desa Tanah Merah, telah berhasil direlokasikan dan kemajuan seluruh program kesleuruhan kearah pelaksanaan keamanan terpadu berbasis masyarakat termasuk penandatanganan pedoman lapangan di antara Polisi Pakuan dan BP yang memasukkan Aas Sukarela.

Tanpa mengabaikan tahun 2004, yang berhasil, tantangan yang sulit masih dihadapi. Dalam masalah penyebaran manfaat dampak positif yang nyata, kepada pantau utara, BP mengakui bahwa ia harus meninjau ulang pendekatan mereka dan mencari jalan untuk mengintensifikasi kemajuan. Sama halnya, ia akan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana peningkatann komunikasi dengan masyarakat di wilayah Teluk Bintuni.

Tanggapan BP terhadap laporan TIAP tahun 2004 ini, disusun dalam empat judul; masalah -masalah sosial, masala-masalah lingkungan, pengelolaan pendapatan dan keterlibatan stakeholder.

TANGGAPAN BP TERHADAP MASING-MASING REKOMENDASI TIAP.⁴

3 TIAP; ‘Laporan Ketiga mengenai proyek LNG’, Februari 2005, halaman 2.

4 TIAP; ‘Laporan Ketiga mengenai proyek LNG’, Februari 2005, halaman 2.

Masalah-masalah sosial

Pantai Utara

- *Perasaan tidak diperlakukan secara adil, dari penduduk desa pantai utara, harus ditanggulangi secara lebih kuat daripada sebelumnya, peningkatan manfaat nyata harus diberikan kepada masyarakat pantai utara untuk dapat memperbaiki ketidakseimbangan persepsi dan rasa ketidakadilan.*
- *Koordinasi dengan Kabupaten Bintuni, BP harus membuat dana atau program untuk mendukung pengembangan masyarakat pantai utara, termasuk kemungkinan program jangka panjang untuk renovasi dan pembangunan perumahan di masing-masing DAV.*

BP mengakui bahwa terdapat persepsi ketidakadilan di antara beberapa stakeholders di pantai utara Teluk Bintuni, dan potensi persepsi ini dalam mempengaruhi proyek. Pantai utara telah selalu merupakan bagian terpadu dalam program sosial terpadu Tangguh (ISP) untuk wilayah tersebut. Namun kami menyetujui, bahwa terdapat kebutuhan dalam peningkatan langkah pelaksanaan program tersebut.

Dalam jangkawaktu dekat, kami akan memprioritaskan program catu daya air bersih dan sanitasi. Selama tahun 2005, BP akan memasang sistem air bersih dan sanitasi di semua DAV. Sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat, di samping itu, BP bersama-sama Kabupaten Bintuni akan memberikan sumbangsih kepada pendidikan dasar pantai utara, dalam bentuk peningkatann prasarana dan tempat penginapan harian (day-boarding) (setengah asrama). Program untuk sekolah sebagai unsur dari program pengembangan masyarakat.

Dalam jangkawaktu menengah kami akan membuka suatu Pelatihan Kejuruan di Bintuni yang bersifat temporer, dan akan membantu pemerintah daerah setempat mendirikan suatu pusat yang permanen di Aranday (Pantai Utara) yang mereka targetkan untuk tahun 2006. Tahun ini, pusat temporer tersebut akan dimulai dalam melatih siswa dalam ketrampilan seperti pertukangan kayu, pertukangan batu, dan pemeliharaan mesin.

Secara khusus berkenaan dengan perumahan, BP akan mengusulkan program untuk renovasi rumah yang akan melibatkan kerjasama di antara masyarakat pantai utara, lembaga-lembaga independen, dan pemerintah daerah setempat.

Pengembangan Masyarakat & Usaha Mikro

- Semua komitmen terhadap Tanah Merah harus diimplementasikan secara penuh termasuk program pengembangan pertanian, yang memfasilitasikan lahan perikanan, pembuatan kapal, pelatihan untuk pemerosesan pasca panen produk kelautan, implementasi bisnis skala kecil, mendirikan koperasi desa. Bagaimanapun, BP tidak boleh terlambat dalam jadwal waktu pengadaan bahan baker dan penyediaan pangan untuk menghindarkan ketergantungan.
- Daan Bantuan Pengembangan Masyarakat untuk setiap DAV harus dilanjutkan melalui pembangunan cepat proyek tersebut.
- Sehubungan dengan administrasi dana pengembangan masyarakat DAV, BP harus menjelaskan, bahwa kepala desa harus setuju atas suatu proyek, yang harus disetujui sebagaimana mestinya sebelumnya; bahwa semua dana akan tetap tersedia kepada para penduduk desa jika tidak digunakan dalam tahun berjalan; dan bahwa pembukuan yang lengkap dari semua dana yang dikucurkan akan tersedia bagi semua penduduk desa yang ingin melihat.

- Setiap upaya harus dilakukan untuk mengadakan barang-barang dan jasa yang bias diperoleh setempat yang memungkinkan.
- Di samping program kesehatan di DAV, dan kegiatan pengendalian malaria, penting agar BP bekerja dengan dengan pejabat kesehatan setempat mengenai pencegahan HIV di seluruh Wilayah Kepala Burung.

Tanggung akan memenuhi komitmennya kepada penduduk Tanah Merah. Rencana Tindakan Pemukiman Kembali, Akuisisi Lahan Proyek tersebut (LARAP) yang menentukan kewajiban, dan menyebutkan inisiatif keseluruhan untuk masyarakat yang terkena pemukiman kembali tersebut. Kami menyadari risiko untuk menciptakan ketergantungan sebagai konsekuensi proyek pemukiman kembali tersebut, sebagaimana memang dilakukan di seluruh Teluk. Sasaran kami adalah untuk membangun kapasitas setingkat desa untuk pengelolaan sendiri, sementara secara serentak mengurangi dukungan seperti pengadaan bahan bakar dan penyediaan keranjang pangan.

Para mitra patungan Tangguh mempunyai komitmen untuk mengakui dan program pengembangan untuk setiap DAV selama 10 tahun. Kontribusi tersebut mamfasilitasi suatu proses perencanaan, dimana masyarakat diberdayakan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunannya. Contoh-contoh pada saat ini mencakup pembangunan jalan setapak, pembangunan dermaga, catu daya air bersih dan sanitasi.

Di mana memungkinkan, Proyek mempunyai komitmen terhadap pengadaan barang-barang dan jasa dari para kontraktor yang berdomisili di Papua. Hal ini telah menghasilkan manfaat keuangan yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan setempat. Contoh-contoh pengadaan ini telah mencakup pembelian pembelian jasa umum untuk operasi Tangguh, pembangunan desa dan material terkait, pemagaran untuk keamanan dan penyewaan kapal.

Proyek-proyek masyarakat disetujui dengan penduduk desa dan kontribusi tahunan dapat diputar dari tahun ke tahun. Karakteristik pemutaran roll-over telah dikomunikasikan di masa lalu, dan akan dipastikan bahwa telah dinyatakan kepada para stakeholder desa.

BP mengakui bahwa lingkup peranserta dalam pengadaan juga tergantung atas kapasitas untuk bersaing dalam pedoman Proyek. Dalam tanggapan ini, kami telah membantu perusahaan-perusahaan Papua dalam pengembangan standar keselamatan kerja dan industrial. Proyek telah menginvestasikan secara signifikan Pelatihan Jaminan Mutu (QA/Baku Mutu (QC), pengelolaan pembangunan dan wawasan untuk meningkatkan standar kontraktor kita dan kinerjanya.

Upaya ini telah diterjemahkan dalam peningkatan yang signifikan menyediakan kepada kontraktor kita dengan kemampuan untuk memenuhi persyaratan global BP akan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (HSE) dan akan berkelanjutan.

Dibawah DGS terdapat pemberdayaan komponen bisnis Papua yang mempunyai sasaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bekerja dengan Proyek dan kontraktornya. Untuk itu, BP telah terlibat dengan KADIN cabang Papua. Kami akan terus bekerja dengan sumber setempat dan menyetujui bahwa penting bagi pengembangan bisnis setempat.

Kami senang dengan pengakuan Panel mengenai keberhasilan inisiatif kesehatan yang dilaksanakan oleh Proyek. Inisiatif ini mencakup pengendalian malaria, perawatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian TBC dan program air bersih dan sanitasi. Kami secara aktif mengimplementasikan sejumlah prasarana kesehatan khusus dan intervensi dalam pembangunan kapasitas sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat Proyek, yang

didasarkan atas penilaian kebutuhan kesehatan tingkat-kecamatan yang diselesaikan pada tahun 2003.

Kami sepakat dengan Panel, bahwa pekerjaan pencegahan HIV adalah penting. HIV pada saat ini ada di Wilayah Bintuni. Program kesehatan masyarakat benar-benar menyediakan dukungan bagi program yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah ini, penurunan stigmatisasi dan pelibatan para stakeholder daerah tersebut dalam pengembangan perencanaan pencegahan.

Unit Kesehatan Masyarakat Proyek Tangguh melakukan pertemuan secara berkala dengan organisasi-organisasi perawatan kesehatan dan LSM berkenaan dengan kegiatan pencegahan HIV di Wilayah Kepala Burung. Secara bersama-sama dengan kelompok ini BP tengah merencanakan dukungan pencegahan HIV di Bintuni, Manokwari dan Fak-Fak dan telah meminta perkumpulan Peduli Sehat (PtPS) suatu LSM perawatan kesehatan berbasis Manokwari menyerahkan suatu proposal mengenai bagaimana struktur yang paling efisien dalam dukungan semacam ini. BP akan melibatkan para pejabat dari Sorong Selatan dalam program pencegahan HIV/AIDS.

Akan tetapi BP perlu untuk menegaskan, bahwa HIV adalah suatu tantangan global yang harus secara bersama-sama ditangani pada tingkat makro yang melibatkan, baik organisasi-organisasi di tingkat setempat, nasional maupun internasional.

Pendidikan dan Pelatihan

- *BP harus menjajaki dengan Kabupaten Bintuni mengenai kemungkinan pemberian beasiswa untuk para siswa dari DAVs-DAVs dan desa-desa lainnya di Kabupaten untuk mengikuti sekolah menengah yang baru di Tanah Merah.*

- *Disamping pemberian dana pengembangan masyarakat tahunan untuk masing-masing DAV ini, BP harus bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni untuk mendukung peningkatan dari sekolah-sekolah dasar di masing-masing DAV dan kota-kota yang terkena dampak di wilayah tersebut.*
- *Program BP untuk melatih orang-orang Papua dalam posisi operasi dan manajemen di Tangguh harus dilanjutkan dan diperdalam.*

BP pada saat ini telah melatih dua puluh delapan (28) orang Papua di fasilitas Bontang di Kalimantan, Indonesia. Kelompok ini menerima preparat teknis yang akan memungkinkan para anggotanya untuk menjadi operator lapangan di instalasi LNG Tangguh. BP menjaga suatu program rekrutmen yang aktif untuk orang-orang Papua dan dimana memungkinkan mencari suatu cara untuk meningkatkan jumlahnya. Kami akan melanjutkan untuk melaksanakan rencana ini sebagai dukungan pada tujuan bisnis setempat dari Proyek tersebut maupun sasaran dalam mengembangkan bisnis dimasa depan serta para pemimpin operasi dari masyarakat Papua sendiri.

Masyarakat Papua juga menerima pelatihan profesional dibidang lainnya. Pada saat ini lebih dari seratus (100) orang Papua telah dilatih untuk bersama-sama dengan pasukan keamanan terpadu berbasis masyarakat dari Proyek. Pelatihan dan upaya rekrutmen aktif juga tengah berlangsung dan kami mengharapkan, bahwa rekrutmen ini akan dimasa nanti memberikan sumbangsih untuk menggandakan jumlah personil sekuriti Papua

Sebagai bagian dari program kewenangan masyarakat Proyek, BP mempunyai komitmen untuk memberikan pendidikan yang mencakup dukungan operasional sekolah dasar di Onar Baru dan sekolah dasar di Tanah Merah (kehadiran siswa dan para guru). BP telah bekerjasama dengan pemerintah setempat dan yayasan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan memberikan

dukungan pada masalah pendidikan di Teluk Bintuni dan suatu fokus khusus di sekolah-sekolah di DAVs.

Keamanan dan Hak Asasi Manusia

- *Surat Keputusan Bersama diantara BP dan Polisi Daerah Papua mengenai pedoman untuk implementasi langkah-langkah keamanan bersama harus diadakan dan disiarkan kepada umum serta sesuai dengan ketentuan pedoman tersebut, BP harus mempunyai komitmen untuk secara publik, mengungkapkan semua pembayaran atau pengadaan material atau jasa yang dibuat dibawah ini.*
- *BP harus menjamin bahwa pedoman lapangan untuk langkah-langkah keamanan diantara BP dan Polisi Daerah Papua yang diterapkan oleh Komando Polisi baru yang dibentuk di Propinsi Irian Jaya Barat*
- *Jika dibentuk sub komando baru oleh TNI di Kecamatan Bintuni, BP harus mengadakan hubungan baik dengan Sub Komandannya, dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin, agar Komandan ini mempunyai komitmen Pedoman Lapangan untuk Kemanan dan Azas Kemanan Berbasis Masyarakat.*
- *Suatu mekanisme pemantauan dan pelaporan harus dibuat, terhadap adanya pelanggaran kebijakan BP oleh karyawan BP manapun, atau kontraktornya berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, Lingkungan atau Hubungan Masyarakat.*

BP akan mendukung edaran Surat Keputusan Bersama, di antara Perusahaan dan Polisi Daerah Papua, akan tetapi, BP tidak dapat menggunakan hal ini sebagai tindakan sepihak, dan surat edaran tersebut harus disetujui oleh Polisi Daerah tersebut. BP saat ini, tengah mengadakan pembicaraan dengan Polisi mengenai SK ini, dan mereka sedang meninjau ulang dokumen

tersebut untuk ketentuan khusus apapun, yang dapat peka / rawan keamanan atau bersifat rahasia. Kami menganalisis keputusan Polisi dalam waktu dekat ini. Disamping itu, BP berkomitmen untuk mengungkapkan semua pembayaran yang dibuat sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Pembahasan mengenai komando Polisi di Irian Jaya Barat, bersifat spekulatif, sampai dibuat keputusan politik internal mengenai propinsi baru ini. Kami telah diberitahu oleh Polisi, bahwa persetujuan tersebut akan mengikat komando yang baru. Sama halnya, pembahasan mengenai KODAM baru, akan masih terlalu dini. BP menjaga suatu hubungan yang positif dengan para stakeholders di seluruh wilayah, dan akan menangani masalah tersebut, jika dan ketika komando baru ini dibentuk.

Tengah dikembangkan mekanisme khusus untuk menangani pengelolaan hubungan industrial dan prosedur pengajuan keluhan, bersama-sama dengan sistem pemantauannya. Prosedur yang jelas dan khusus akan dibuat, untuk merunut adanya kecurigaan pelanggaran BP dan kebijakan Proyek, termasuk adanya penyalahgunaan hak azasi manusia, yang dicurigai telah terjadi. BP akan memenuhi ketentuan hak azasi manusia dan kewajiban secara sukarela, namun dengan cara paling serius, termasuk didalamnya, ketentuan dalam pemantauan dan pelaporan. Kami belajar dari proyek-proyek lain dan telah berkonsultasi dengan sejumlah pakar di bidang ini. Suatu prosedur internal tengah dikembangkan saat ini, menetapkan proses penanganan tuduhan penyalahgunaan hak azasi manusia di wilayah operasi. Konsultasi dengan LSM setempat, meminta pendapat KOMNASHAM, Komisi Hak Azasi Manusia Indonesia, Polisi dan BPMIGAS juga kami lakukan.

Kontraktor Proyek Tangguh diwajibkan untuk memenuhi semua prosedur dan kebijakan BP, sebagai ketentuan pengaturan kontraktual kita. Kontrak akan

mencakup ketentuan kesesuaian, dengan sukarela, pada keamanan dan hak azasi manusia.

BP bekerja dengan program kemananan Tangguh berbasis masyarakat, dengan sasaran membentuk forum kemanan di pantai utara dan selatan Teluk. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan Polisi Daerah Papua, para pemimpin setempat dan masyarakat. Forum ini akan terdiri dari anggota masyarakat, pemimpin adat dan agama, para wakil polisi, militer dan pejabat pemerintah setempat untuk tujuan pembahasan masalah-masalah keamanan ini, yang terkait dengan perlindungan hak azasi manusia. BP juga bekertjasama dengan UNIPA (Universitas Negeri Papua) akan mensurvei pendapat para penduduk desa dan polisi, dan membantu dengan perancangan dan impelementasi program.

Migrasi-ke-Dalam

- *Panil sangat mendukung rencana BP, bagi Kontraktornya, untuk menyewa dan membayar pekerja non-residen untuk lokasi-lokasi terpencil, guna membatasi kegiatan diluar-tapak pekerja-pekerja ini dan, sejauh memungkinkan untuk mengatur penggunaan uang tunai hingga sekecil mungkin, di atau di sekeliling tapak/lokasi Proyek.*
- *Kewajiban Kontraktual untuk mempekerjakan dan melatih pekerja agar dilaksanakan oleh Kontraktor dan Subkontraktor BP, harus secara seksama dipantau dan secara ketat dilaksanakan.*

BP mengakui, bahwa rekrutmen orang-orang Papua, dan mencegah migrasi-ke-dalam yang tak terkendali, merupakan tantangan tersendiri. Rekrutmen angkatan kerja Tangguh dan pengelolaan strategi telah secara khusus dirancang untuk tanggap terhadap kepedulian, yang terkait dengan

rekrutmen orang-orang Papua, mitigasi migrasi-ke-dalam ini dan memperkecil dampak angkatan kerja tersebut, di masyarakat sekeliling tapak/lokasi proyek.

Secara khusus, kami akan terus memantau migrasi-ke-dalam di tapak dan desa-desa di pantai selatan. Meski minor, kami telah melihat bukti akan adanya migrasi-ke-dalam yang telah terjadi. BP tak dapat langsung mengawasi hal ini; tanggungjawab utama terletak di kepala desa dan penduduk desa sendiri. Sebagai bagian dari DGS, BP akan melaksanakan kampanye pendidikan dan kesadaran bagi penduduk desa dan pejabat pemerintah setempat tahun ini, untuk membantu membentuk kesadaran mengenai dampak potensial migrasi-ke-dalam tersebut. Kami juga tengah membahas dengan LSM setempat, mengenai limbah yang dapat mereka bantu, pejabat pemerintah dan masyarakat setempat ketika proyek mengadakan rekrutmen tenaga kerja.

BP tengah dalam proses mendirikan kantor penghubung proyek di Manokwari, Sorong, Bintuni dan Fakfak. Pada saat ini, kami mempunyai kantor-kantor yang buka dan dikelola di Manokwari, Sorong dan Bintuni. Tengah dijalankan rencana suatu kantor di Fakfak.

Proyek telah berkomitmen untuk sekurang-kurangnya menciptakan satu pekerjaan per rumah tangga di setiap DAV, selama tahap pembangunan. Pada bulan Januari 2005, BP mulai program komunikasi rekrutmen di seluruh Teluk.

BP mempunyai mekanisme sebagai ganti mengawasi kontraktor berkenaan dengan pengelolaan tenaga kerja, termasuk mekanisme untuk pelaporan

kemajuan. Kami mempunyai coordinator pengelolaan tenaga kerja Proyek yang berkerja dengan sangat erat dengan para kontraktor.

Masalah lingkungan

- *Dengan bekerjasama dengan Kabupaten Bintuni dan departemen Perikanan, BP harus mendukung pengembangan rencana pengelolaan perikanan untuk teluk Bintuni maupun manfaat nyata khusus untuk para nelayan setempat dalam bentuk kapal penangkap ikan dan perlengkapannya yang lebih maju.*
- *Di samping itu, komitmennya yang ditetapkan dalam AMDAL, BP harus berkonsultasi dengan pejabat berwenang lingkungan baik di tingkat local, propinsi maupun nasional untuk mengamankan ekosistem Teluk Bintuni dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan tapak/lokasi Proyek.*
- *BP harus memantau semua limbah dan buangan lainnya, baik di pantai maupun di lepas pantai, selama pembangunan dan mendistribusikan hasilnya kepada pihak berwenang yang terkait.*
- *BP harus memastikan dan melanjutkan komitmennya untuk mendukung pelestarian hutan bakau/manrova yang penting/kritis termasuk pendirian Cagar Alam di Teluk Bintuni.*

BP mengakui kepedulian Panil mengenai perikanan di teluk Bintuni. Sebagai bagian dari Proyek DGS dan program keanekaragaman hayati, kami tengah bekerja dibahu membahu dengan pemerintah Papua dalam kemitraan dengan sejumlah LSM lingkungan baik local maupun internasional untuk menangani masalah ini. Dengan demikian, BP telah mengangkat UNIPA sebagai komisi, dengan dukungan teknis dari World Wildlife Fund untuk Cagar Alam, Depoartemen Perikanan Papua, dan pemerintah setempat untuk

melaksanakan Survei Penilaian Kesehatan Perikanan [FHAS] Teluk Bintuni. Laporan terakhir yang telah diselesaikan, memberikan informasi berharga untuk pengembangan Rencana Pengelolaan Teluk Bintuni, yang dipimpin oleh USAID dan mitra LSM serta pemerintah yang melaksanakan.

BP akan, bersama-sama dengan UNIPA, memuat laporan perikanan dapat dibaca oleh pejabat berwenang Indonesia terkait, baik di tingkat local maupun di tingkat nasional. Kami mempunyai sasaran untuk mendukung seminar yang diorganisasikan oleh the Nature Conservancy mengenai pembangunan yang berkelanjutan di Teluk Bintuni.

Dengan mengakui peran utama pemerintah baik di tingkat local maupun provinsi dalam melindungi dan mengelola sumberdaya Teluk, maka BP mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga ekosistem Teluk tersebut, dan wilayah dekat dengan tapak/lokasi proyek tersebut. Sejak tahun 2002, BP telah mengimplementasikan rencana tindakan keragaman hayati yang melibatkan program konservasi untuk area tersebut. Program tersebut terbagi dalam delapan modul, yang enam di antaranya telah diselesaikan. Masing-masing program dilaksanakan dalam kemitraan dengan organisasi konservasi yang bertanggungjawab, universitas dan lembaga pemerintah. Di samping itu, program pengembangan masyarakat Proyek, mencakup program nelayan setempat, yang diuraikan lebih lengkap dalam Proyek LARAP, yang akan dipublikasikan pada website BP dalam bulan April.

Berkenaan dengan pemantauan limbah Proyek dan buangan, kami telah melaksanakannya untuk saluran buangan di kamp dengan memberikan perlakuan, yang pada saat ini merupakan satu-satunya saluran limbah cair Proyek. Proyek memonitor mutu limbah cair (sewage) untuk memastikan terpenuhinya standar yang ditetapkan. Pemantauan lepas pantai akan dilakukan selama tahap pembangunan utama. Laporan pematuhan ketentuan AMDAL diserahkan enam

bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi-instansi pemerintah Indonesia lainnya.

BP menegaskan lagi komitmennya pada Cagar Alam Teluk Bintuni. Manajemen hutan lindung bakau merupakan unsur utama dari Rencana Aksi Biodiversitas (keaneka ragaman hayati) Tangguh. Tujuan dari Rencana Pengelolaan Hutan Lindung Bakau Bintuni ialah mengembangkan daerah yang memiliki arti penting secara global ini seraya menjawab secara signifikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. Dengan cara demikian masyarakat akan merasa terlibat, memiliki dan menghargai rencana tersebut. Selain itu, proses ini tengah dipadu dengan suatu strategi teluk yang lebih luas yang dikelola oleh satu kelompok kerja multisektor terlatih di bawah dukungan donor.

Mitra-mitra strategis kita untuk proyek tersebut mencakup CRMP (Coastal Resource Management Partnership – Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Pantai), UNIPA, The Nature Conservancy (Pelestarian Alam), Institut Pertanian Bogor (IPB), kantor-kantor daerah Kementerian Pertanian, lembaga-lembaga pemerintah lokal, propinsi, dan nasional, berbagai organisasi pelestarian dan kelompok-kelompok masyarakat madani. Proyek tersebut direncanakan selesai pada September 2005.

Terakhir, BP akan bekerja sama dengan CRMP-yang-didanaikan-oleh-USAID dalam menyediakan lebih banyak lagi atlas lingkungan kepada badan-badan perencana pemerintah daerah. Atas tersebut dikembangkan dengan masukan yang signifikan tentang Papua dari beberapa kelompok masyarakat, universitas, dan pemerintah.

Manajemen Pendapatan

- Akibat usul pendirian propinsi Irian Jaya Barat, keterlambatan dalam penerimaan pendapatan dari Otonomi Khusus dan peningkatan mendadak dalam pendapatan di masa datang berisiko menimbulkan kegoncangan (ketidakseimbangan) serius dan menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, adalah mutlak perlu BP bekerja dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun dengan para pemberi pinjaman uang multinasional untuk memikirkan (menghasilkan) suatu mekanisme untuk memajukan dan melancarkan arus pendapatan.
- Adalah mutlak perlu BP berperan sebagai pendorong bagi kementerian-kementerian utama pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemberi pinjaman multinasional untuk mengembangkan suatu mekanisme pembiayaan yang memajukan dan melancarkan arus pendapatan pemerintah dari Tangguh ke Irian Jaya Barat.

BP tanggap sepenuhnya akan isu-isu yang diangkat oleh TIAP tentang pola-pola arus dana pemerintah ke propinsi itu. Sementara proyek itu direncanakan baru mulai pada akhir 2008, tidak ada dana-dana yang berarti mengalir ke Papua selama beberapa tahun, pada saat pembangunan kapasitas (upaya pemberdayaan) masih berjalan. Kami mengakui bahwa kebutuhan-kebutuhan Papua sangat besar dan bahwa harapan-harapan rakyat Papua sendiri sangat tinggi. Kami juga sependapat bahwa terdapat suatu makna besar di balik gagasan tentang mekanisme yang dapat menyediakan dana pembangunan secara dini, baik itu melalui mekanisme pembiayaan maupun cara lain. Bantuan dini demikian dapat membantu propinsi itu mewujudkan manfaat-manfaat besar yang digambarkan oleh Otonomi Khusus, selain dapat membangun kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan.

Tanggung jawab utama bagi pengembangan dan pemilikan suatu mekanisme pembiayaan dini berada di tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. BP adalah hanya kontraktor Pemerintah Indonesia dan sebagai demikian tidak dapat

bertindak sebagai kepanjangan tangan Pemerintah. Kami menyadari peran utama kami tidak lebih daripada meningkatkan kesadaran tentang sifat arus dana dari Tangguh, dan selebihnya berbagi informasi dan memberi bantuan bila pemerintah memintanya.

Tantangan untuk melancarkan pendapatan merupakan satu dimensi dari isu dampak fiskal. Hal itu sudah pernah dibahas oleh BP bersama pejabat-pejabat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun dengan lembaga-lembaga donor multilateral untuk mempertajam pemahaman dan kesadaran akan isu tersebut. Sebagai bagian dari program-program pembangunan masyarakat dan DGS Proyek, BP mendukung dan akan terus mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran dan pendapatan, perencanaan pembangunan daerah, dan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kami mendukung Pusat Pembaruan Pemerintah Daerah (CLGI/YIPD) dalam usahanya untuk memberdayakan pemerintah-pemerintah daerah di Bintuni dan Manokwari. Kami juga mendukung Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) untuk menawarkan program-program pemberdayaan di Bintuni.

Keterlibatan Pihak yang berkepentingan (stakeholder engagement)

Kabupaten Baru

- Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat-pejabat pemerintah daerah, terutama Bupati baru di Bintuni, harus digalakkan. BP harus berkonsultasi dengan Kabupaten baru tentang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perikanan, infrastruktur, dan, sejauh mungkin, berkoordinasi dengan Kabupaten baru tersebut.

Seiring dengan semakin mapannya otorita-otorita daerah, BP bertujuan membangun kemitraan yang lebih kokoh dengan pemerintah daerah.

Meskipun kami paham akan pentingnya keterlibatan dalam berbagai isu, BP harus tetap sadar, bahwa peran kami adalah hanya sebagai salah satu mitra dagang yang tunduk pada Kontrak Bagi Hasil dan hukum Indonesia.

Keterbukaan (transparansi)

- Bekerja dengan pihak berwenang, baik di tingkat nasional, propinsi, dan lokal, BP harus mendorong diumumkannya dengan jelas segala penerimaan dan pengeluaran mengenai pendapatan-pendapatan Tangguh. BP harus segera mendorong BPMigas menerbitkan ketentuan dan syarat-syarat tentang perjanjian bagi hasil dan unsur-unsur nonkomersial dari rencana pembangunan; menerbitkan Pedoman Lapangan untuk Keamanan dengan Polisi Daerah dan membeberkan segala pembayaran yang dilakukan sejauh ini sesuai dengan perjanjian itu; dan menerbitkan untuk tiap DAV pembukuan lengkap tentang pengeluaran-pengeluaran dana pembangunan masyarakat.

BP berpegang teguh pada prinsip-prinsip keterbukaan karena bagi kami keterbukaan adalah pertanda bisnis yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan Proyek, kami akan mengamalkan keterbukaan kapan saja kami dapat berbuat demikian, selaku kontraktor untuk Pemerintah Indonesia yang harus mematuhi Undang-undang Indonesia tentang Minyak dan Gas dan tentang kerahasiaan data.

Tentang pengumuman segala penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan Tangguh, pengumuman demikian memerlukan persetujuan dari Pemerintah. Saat ini perkiraan dini tentang pendapatan telah disediakan dalam AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) Tangguh yang disetujui oleh Pemerintah pada Oktober 2002. Bulan Juli lalu, kami membantu BPMIGAS dalam upaya sosialisasi dengan pemerintah-pemerintah Papua tentang Rencana Pembangunan Tangguh

(POD) yang mencakup informasi yang disiapkan oleh BPMIGAS tentang arus pendapatan dan sumbangan-sumbangan dari Proyek.

Karena ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia usaha dalam Kontrak Bagi Hasil dan Rencana Pembangunan itu maka BP wajib terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Pemerintah tentang apa-apa saja yang boleh diumumkan/diterbitkan. Kami sudah berembuk dengan Polisi tentang pedoman keamanan, sebagaimana diulas dalam bagian tentang Keamanan dan HAM dalam jawaban ini.

Komunikasi/Hubungan di Teluk Bintuni

- Komunikasi dengan para stakeholder yang terkena dampak proyek harus ditingkatkan, terutama di daerah Teluk Bintuni.
- Mutlak perlu digunakan cara-cara baru dan inovatif dalam menyampaikan informasi yang masuk akal, dapat dimengerti, dan spesifik mengenai kegiatan-kegiatan dan komitmen-komitmen Proyek pada masyarakat Teluk Bintuni.
- BP harus berusaha agar lebih banyak lagi diterbitkan dalam media luar negeri artikel-artikel tentang proyek-proyek yang ada dan akan ada di daerah Teluk Bintuni.
- Bekerja dengan Bupati Bintuni, BP harus menetapkan Forum Teluk Bintuni sebagai sarana untuk mengumumkan kegiatan-kegiatan dan isu-isu yang berkaitan dengan Tangguh dan meningkatkan komunikasi antarmasyarakat di seantero daerah Teluk Bintuni.
- BP harus menetapkan prosedur tentang sarana komunikasi dan komunikasi-komunikasi berkaitan dengan setiap kecelakaan atau insiden yang merugikan yang terkait dengan Proyek.

BP mengakui bahwa komunikasi yang baik sangat menentukan bagi keberhasilan Proyek, dan kami sependapat bahwa ada ruang untuk perbaikan di bidang komunikasi ini. Upaya-upaya yang telah kami rintis pada 2004 akan terus

berlanjut, dan kami mengambil langkah-langkah aktif untuk meningkatkan laju pengembangan dialog yang pekap dan bernas antara Tangguh dan para *stakeholder*-nya. Menyadari tantangan-tantangan di daerah ini, kami telah mengembangkan satu rencana komunikasi Tangguh dalam upaya membuka lebar-lebar akses informasi dan mengikutsertakan para stakeholder di Teluk Bintuni.

Adalah mutlak perlu bahwa semua lapisan masyarakat di Teluk Bintuni memiliki akses ke informasi Proyek yang akurat dan tepat waktu. Untuk memfasilitasi hal ini kami telah memulai prakarsa setempat termasuk program siaran radio, yang mulai di bulan Januari dan baru-baru ini menampilkan wakil-wakil dari kantor tenaga kerja setempat. Program tersebut berfokus pada prosedur-prosedur pengajuan permohonan kerja dan perekrutan; program tersebut telah pula ditingkatkan dengan pemasangan poster-poster dan pengadaan secara umum alat peraga visual lainnya. Program di masa datang sudah direncanakan dan akan mencakup pengulangan informasi ketenagakerjaan maupun diskusi tentang prakarsa-prakarsa proyek lainnya seperti program kesehatan dan pendidikan. Program tersebut juga akan berfungsi sebagai forum komunikasi yang dapat menjadi sarana penyampaian masukan dari sidang pendengar kami.

Akan halnya media cetak, staf Proyek telah menghubungi berbagai organisasi sarana komunikasi pada bulan Januari. Di Manokwari pertemuan-pertemuan dilakukan dengan Harian Papua, Harian Cahaya Papua, dan radio RRI. Di Jayapura, Proyek bertemu dengan editor-editor senior dari Cenderawasih Pos. Lanjutan direncanakan untuk Maret, dan akan mencakup hubungan dengan organisasi media lain termasuk Nueva Daily dan Henggi Pos di Fak-Fak dan Radar Sorong dan Fajar Papua di Sorong. Bersama-sama organisasi-organisasi berita ini menyajikan liputan bagi sebagian besar penduduk Teluk Bintuni.

Kami akan mulai membagi-bagikan buletin bulanan Proyek, dalam bahasa Indonesia, kepada para stakeholder lintas Papua yang akan menyajikan rincian-rincian tentang kegiatan-kegiatan mengenai proyek dan pembangunan.

Kami sepakat, bahwa kami perlu memikirkan pendekatan-pendekatan yang bermutu dalam berkomunikasi dengan para stakeholder kami. Namun demikian kami tetap yakin bahwa perbualan secara tatap muka (*face-to-face exchanges*) adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa orang-orang desa dapat mengakses informasi proyek dan, berkat dialog-dialog dengan Tangguh, mengalami pemberdayaan. Untuk mewujudkan akses informasi dan keberdayaan ini kami akan melancarkan gelar-gelar informasi (pertunjukan sepanjang jalan) di tingkat desa. Kami sedang menjajaki kelayakan dari memfasilitasi suatu forum dengan mana warga masyarakat dapat mengetahui lebih banyak tentang prakarsa-prakarsa Tangguh. Forum ini dapat dalam bentuk layanan radio.

Terakhir, Proyek siukan bahwa sistem yang tangguh dalam hal komunikasi, proses, dan prosedur untuk menangani dengan baik segala kedaruratan adalah perlu dan tidak dapat ditawar-tawar. Kami tengah mengidentifikasi sistem-sistem melalui mana saluran kontak antara pemimpin operasi dan pemimpin komunikasi terlembagakan. Tidak hanya itu; kami juga akan mengadakan program komunikasi krisis dan menjamin adanya pedoman yang jelas mengenai pelaporan insiden yang terjadi.